

BAB V PENUTUP

KESIMPULAN

Hubungan bilateral dua Negara berdaulat tidak selamanya berjalan lancar, terkadang ada beberapa penyebab yang kemudian membuat hubungan dua Negara menjadi bergejolak dan berjalan tidak harmonis. Hal tersebut bisa terjadi karena pergantian rezim di salah satu Negara, sengketa wilayah, pergeseran orientasi politik luar negeri maupun perubahan kepentingan nasional yang ingin diraih dari sebuah hubungan. Ada banyak determinan yang kemudian mempengaruhi pembuatan sebuah kebijakan luar negeri suatu Negara, kemudian oleh William D. Coplin disederhanakan menjadi tiga determinan utama yang mempengaruhi kebijakan Politik Luar Negeri sebuah Negara. Tiga determinan tersebut yaitu kondisi politik domestik, kondisi ekonomi dan militer, serta konteks internasional. Dari uraian dan analisa penulis di BAB-BAB sebelumnya, dalam kasus terjadinya gejolak hubungan bilateral antara Filipina dan AS maka Penulis menyimpulkan bahwa berdasarkan pada penerapan Konsep Politik Luar Negeri dari Coplin, secara tidak langsung tiga determinan tersebut memang berpengaruh dalam kebijakan Politik Luar Negeri Filipina di era Presiden Duterte terhadap AS.

Dari determinan kondisi politik domestik, Presiden Duterte memiliki legitimasi yang kuat karena menenangkan Pemilihan Presiden Filipina tahun 2016 dengan selisih yang besar, kemudian dari survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga independen menunjukkan kepuasan rakyat Filipina terhadap kepemimpinan Presiden Duterte. Sehingga Presiden Duterte menjadi sentris dalam pengambilan semua kebijakan, termasuk meninjau ulang hubungan Filipina dan AS karena AS tidak mendukung dan malah mengkritik kebijakan *War on Drugs* yang dikeluarkan Presiden Duterte. Kemudian dari

kondisi ekonomi dan militer, Filipina selama ini sangat bergantung dengan bantuan luar negeri dari AS dan barang-barang dari AS. Lalu Presiden Duterte menyadari bahwa Tiongkok saat ini menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia yang baru, terutama dengan pendanaan tidak terbatasnya sehingga membuat Presiden Duterte mencoba untuk bermain di dua kaki untuk meraih kepentingan nasional Filipina baik dari AS maupun Tiongkok.

Dari segi militer, Filipina bisa dikatakan sangat lemah karena di Kawasan Asia Tenggara saja menurut data dari *Index Power* yang dirilis *Global Fire Power* pada 2017, menempatkan Filipina di urutan ke enam. Bersamaan dengan upaya agresif Tiongkok dalam membangun pangkalan militer mereka di Laut China Selatan, maka Presiden Duterte harus berpikir ulang jika ingin berkonfrontasi militer secara langsung dengan Tiongkok. Sehingga pilihan terbaiknya adalah bekerjasama dengan Tiongkok, tetapi hal ini yang membuat AS menjadi gerah karena AS sendiri hingga saat ini masih memiliki pangkalan militer di Filipina. Determinan ketiga yaitu konteks internasional, pada era ini kita tidak bisa menutup mata bahwa persaingan antara AS dan Tiongkok dalam bidang ekonomi, militer, dan perebutan pengaruh di dunia internasional semakin kentara. Filipina juga mengalami apa yang Penulis sebut sebagai “Persimpangan Jalan”, karena di satu sisi Filipina adalah sekutu lama AS di Asia Tenggara namun disisi lain Presiden Duterte juga menyadari keuntungan besar yang bisa diperoleh Filipina jika melakukan hubungan kerja sama yang erat dengan Tiongkok. Sehingga hal ini lah yang menjadi dasar politik luar negeri Filipina di era Presiden Duterte, yaitu ingin mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya bagi Filipina dengan risiko terjadi gejolak antara hubungan Filipina dan AS.